



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1507, 2016

KEMENPORA. Kurikulum Pelatihan. Tenaga  
Kepemudaan Nonformal. Pedoman Umum.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN KURIKULUM PELATIHAN  
TENAGA KEPEMUDAAN NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemuda Indonesia merupakan aktor strategis dalam pembangunan bangsa, mengingat pemuda dapat menjadi subyek dan partner pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan agar mampu merespon problema sosial kepemudaan dengan intervensi peningkatan kapasitas tenaga kepemudaan nonformal yang mampu bersaing di era pasar bebas;
- b. bahwa pelatihan kepemudaan nonformal bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemuda sehingga pemuda menjadi individu yang memiliki kompetensi, kepedulian sosial, kemampuan dan komitmen yang tinggi serta aktif di dalam kegiatan fasilitasi kepemudaan sebagai tenaga kepemudaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Umum Penyusunan Kurikulum Tenaga Kepemudaan Nonformal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5444);
  11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  12. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN KURIKULUM PELATIHAN TENAGA KEPEMUDAAN NONFORMAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Pedoman Umum Penyusunan Kurikulum Pelatihan Tenaga Kepemudaan Nonformal merupakan pedoman umum dalam penyusunan kurikulum bagi pelatihan kepada pemuda nonformal yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai wujud

tanggung jawab Pemerintah dalam mendukung pemberdayaan pemuda di Indonesia.

#### Pasal 2

Pedoman umum penyusunan kurikulum pelatihan tenaga kepemudaan nonformal bagi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah/ satuan kerja perangkat daerah/ masyarakat/ lembaga/mitra kepemudaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : RUANG LINGKUP

BAB III: EVALUASI DAN MEKANISME PELAPORAN

BAB IV: PENUTUP

#### Pasal 3

Peraturan Menteri ini sebagai pedoman umum dalam proses penyusunan kurikulum pelatihan tenaga kepemudaan nonformal yang disusun dan ditetapkan dalam mendukung program pemberdayaan pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pedoman umum ini akan dilakukan oleh Kedeputian Bidang Pemberdayaan Pemuda sebagai bagian dari tanggung jawab kedeputian tersebut.

#### Pasal 5

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2016

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN KURIKULUM PELATIHAN TENAGA  
KEPEMUDAAN NON FORMAL

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan Indonesia, pemuda Indonesia merupakan aktor strategis dalam pembangunan bangsa, karena pemuda dapat menjadi subyek dan partner pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Keberadaan pemuda merupakan jaminan bagi keberlangsungan kehidupan bangsa. Pemuda juga merupakan subyek *human capital* yang strategis sebagai modal dasar pembangunan yang sangat adaptif terhadap perubahan dan perkembangan jaman. Dengan jumlah pemuda Indonesia yang cukup besar seharusnya Indonesia mampu mencapai kemajuan pembangunan yang cukup pesat baik dari aspek ekonomi, politik maupun sosial budaya. Menurut data statistik pemuda BPS tahun 2014, jumlah pemuda di Indonesia sudah mencapai 61,83 juta jiwa atau sekitar 24,53% dari total populasi penduduk Indonesia.

Seharusnya dengan jumlah pemuda yang cukup besar, Indonesia tidak mengalami defisit tenaga kerja untuk menjalankan roda perekonomian dan pembangunan bangsa. Ironisnya, realita sosial menunjukkan fakta yang cukup memprihatinkan bahwa angka pemuda pengangguran cukup tinggi. Data BPS tahun 2015 menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan terkait kondisi pengangguran di Indonesia. Pada tahun 2015 angka pengangguran sudah mencapai 7,45 juta. Pengangguran ini disebabkan oleh berbagai faktor, selain menurunnya lapangan kerja akibat krisis ekonomi dan globalisasi, tetapi juga karena rendahnya kualitas SDM pemuda dalam memenuhi kriteria pasar tenaga kerja di era globalisasi.

Dibandingkan dengan India dan Negara Asia Tenggara lainnya, kualitas pemuda Indonesia masih cukup rendah apabila bersaing secara terbuka.

Rendahnya kualitas SDM Pemuda Indonesia ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan para pemuda. Sedangkan rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh rendahnya daya jangkau masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas. Di Indonesia, hanya masyarakat kalangan atas saja yang mampu menyekolahkan anaknya di sekolah berkualitas dengan fasilitas dan materi pendidikan yang bermutu. Belum lagi mahalnnya biaya pendidikan di sekolah menengah atas atau perguruan tinggi. Pelayanan pendidikan Indonesia yang mahal menjadi semakin tak terjangkau oleh masyarakat bawah.

Untuk itu diperlukan upaya pemerintah Indonesia dalam merespon problema sosial ini dengan intervensi peningkatan kapasitas tenaga kepemudaan yang mampu bersaing di era pasar bebas menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asia. Perlu ada aksi kolektif, komprehensif dan terintegrasi dari semua jajaran instansi pemerintah, termasuk Kementerian Pemuda dan Olah Raga, untuk mengatasi gap kualitas SDM yang cukup memprihatinkan ini. Perlu ada terobosan atau *breakthrough* baru dari Pemerintah dan pihak lain (sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat atau komunitas profesional) untuk menjangkau pemuda dengan kategori pendidikan rendah.

Dalam rangka menyelesaikan isu rendahnya kapasitas pemuda, maka Pemerintah Indonesia pada tahun 2009 merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Bab IV poin B yang menyebutkan arah, tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Adapun rumusannya adalah terwujudnya bangsa Indonesia yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 7 dinyatakan bahwa pelayanan kepemudaan diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi dan semangat profesionalisme, serta meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya. Pelayanan kepemudaan dilakukan melalui beberapa strategi transformatif di antaranya melalui penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya. Dengan strategi transformatif, pemuda diharapkan dapat memiliki keahlian untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri dan

malah dapat menciptakan terobosan lapangan pekerjaan yang dapat menopang kebutuhan hidupnya.

Untuk membentuk pemuda dengan kriteria di atas, maka diperlukan upaya yang sistematis dan terstruktur untuk memobilisasi sumber daya yang diperlukan, baik finansial, sarana dan prasarana lain maupun tenaga pendidik yang dapat dilibatkan dalam kegiatan pelatihan. Penyiapan tersebut dilakukan dengan cara melaksanakan pelatihan sesuai dengan minat dan bakat pemuda. Bakat dan minat ini disesuaikan dengan potensi dan kesempatan yang dapat dipetakan dari kebijakan nasional yang disusun oleh pemerintah.

Pelatihan kepemudaan non formal bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemuda agar pemuda tersebut menjadi individu yang memiliki kompetensi, kepedulian sosial, kemampuan dan komitmen yang tinggi serta aktif di dalam kegiatan fasilitasi kepemudaan sebagai tenaga kepemudaan.

Kompetensi tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan, sebagai tenaga fasilitator yang berperan dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk pengembangan program pembangunan di wilayah atau lingkungannya masing-masing. Para fasilitator ini akan melaksanakan fungsi pendampingan tersebut baik secara sukarela maupun atas dukungan dari pemerintah daerah (adanya program rekrutmen pendamping desa dalam implementasi UU Desa) maupun swasta.

Agar pemuda memiliki kemampuan dan motivasi untuk berperan secara optimal serta berkesinambungan, maka diperlukan seri penguatan kapasitas untuk tenaga kepemudaan yang dimulai dengan pelatihan dan dilanjutkan dengan magang atau "*on the job training*" atau mentoring.

B. Permasalahan

1. Belum adanya pedoman pengembangan tenaga kepemudaan non formal yang bersifat holistik, integratif dan komprehensif untuk menunjang peningkatan daya saing pemuda dalam kancah nasional bahkan global;
2. Belum adanya strategi pengembangan kapasitas tenaga kepemudaan non formal yang komprehensif dan berkesinambungan serta terukur;
3. Belum adanya strategi *knowledge management* untuk menyerap pembelajaran dari metode pengembangan kapasitas tenaga kepemudaan non formal yang telah dilaksanakan.

C. Tujuan

Tujuan umum dan tujuan khusus dari pedoman umum penyusunan kurikulum pelatihan tenaga kepemudaan non formal sebagai berikut:

1. Tujuan umum:

Untuk mempersiapkan pelatihan kepemudaan non formal melalui pemberian pedoman penyusunan kurikulum untuk meningkatkan kompetensi pemuda berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan maupun sikap.

2. Tujuan khusus:

Untuk merumuskan kurikulum di setiap bidang yang diperlukan sesuai dengan minat dan bakat pemuda dan juga kesempatan pengembangan potensi pemuda masa depan.

D. Hasil yang Diharapkan

Dengan adanya Pedoman Umum Kurikulum Pelatihan Tenaga Kepemudaan Non Formal dimana didalam kurikulum itu juga akan memuat silabus atau garis besar mata pendidikan dan pelatihan yang memadai dan jelas serta kriteria peserta. Dengan adanya pedoman penyusunan kurikulum ini, maka diharapkan akan terbangun metode pelatihan tenaga kepemudaan non formal yang cukup komprehensif di bidang sebagai berikut:

- 1) Kurikulum pelatihan tenaga kepemudaan bidang kewirausahaan;
- 2) Kurikulum pelatihan tenaga kepemudaan bidang kepemimpinan;
- 3) Kurikulum pelatihan tenaga kepemudaan bidang kemaritiman dan kepariwisataan;
- 4) Kurikulum pelatihan tenaga kepemudaan bidang industri dan kemandirian ekonomi;

- 5) Kurikulum pelatihan tenaga kepemudaan bidang kedaulatan pangan;
- 6) Kurikulum pelatihan tenaga kepemudaan bidang kedaulatan energi;
- 7) Kurikulum pelatihan tenaga kepemudaan bidang tanggap bencana;
- 8) Kurikulum pelatihan tenaga kepemudaan bidang rawan sosial;
- 9) Kurikulum pelatihan tenaga kepemudaan bidang pemberdayaan daerah terluar;
- 10) Kurikulum pelatihan tenaga kepemudaan bidang pencegahan Napza.

E. Pembiayaan/Anggaran

Pembiayaan penyusunan kurikulum dalam rangka Pelatihan Tenaga Kepemudaan Nonformal dibebankan pada APBN Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

## BAB II RUANG LINGKUP

### A. Konsep

#### 1. Kurikulum

Kurikulum memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar, baik di sektor pendidikan formal maupun non-formal. Hal ini dikarenakan kurikulum merupakan instrumen dasar pendidikan yang memuat garis besar materi pendidikan secara sistematis dan terstruktur yang disusun berbasis analisis mendalam terhadap pengamatan tentang kebutuhan subyek didik.

Ada berbagai pandangan yang menjadi dasar pengembangan teori tentang kurikulum ini. Secara umum kurikulum perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan.

Mengacu pada definisi di atas, maka dalam konteks pelatihan tenaga kepemudaan non formal, kurikulum ini akan memuat materi pelatihan di 10 (sepuluh) bidang sebagaimana disebutkan di atas. Dalam hal ini Kemenpora bertindak selaku lembaga penyelenggara pendidikan non formal. Sedangkan kategori pendidikan yang akan dijalankan adalah pendidikan non formal atau non akademik dalam bentuk pelatihan. Kerangka konseptual mengenai pelatihan akan dijelaskan dalam poin selanjutnya.

#### 2. Pelatihan

Pelatihan merupakan salah satu dari kegiatan pendidikan non formal dan sifatnya non akademik serta merespon pada kebutuhan peningkatan kapasitas untuk pencapaian tujuan karir atau bidang pekerjaan tertentu. Secara teknis operasional, pelatihan dapat juga diorganisir, baik oleh lembaga pendidikan maupun lembaga lain untuk merespon permasalahan kesenjangan kapasitas terhadap sasaran subyek didik tertentu.

Pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Pelatihan juga merupakan bagian dari investasi sumber daya manusia (*human investment*) untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kerja.

Perbedaan pelatihan dan pendidikan terurai pada Tabel 1 berikut adalah:

Tabel 1. Komparasi Pelatihan dengan Pendidikan

No.	Pelatihan	Pendidikan
1	Proses mengembangkan ketrampilan untuk suatu pekerjaan atau tugas tertentu	Proses memperoleh pengetahuan atau informasi
2	Menekankan pada “melakukan”	Menekankan pada “mengetahui”
3	Menekankan pencapaian pada tingkat ketrampilan tertentu yang bisa dilakukan	Menekankan tingkat pencapaian pengetahuan dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh orang lain
4	Menekankan cara pandang sistem tertutup, bahwa ada cara khusus yang benar atau salah dalam menunjukkan keterampilan	Menekankan pada cara pandang sistem terbuka, bahwa ada banyak cara yang bisa digunakan untuk 5 mencapai suatu tujuan, berpikir kreatif dan kritis
5	Menekankan pada tingkat kinerja pada suatu pekerjaan tertentu	Menekankan pada informasi yang tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan atau karir tertentu
6	Menekankan pada suatu urutan yang komprehensif dalam menampilkan suatu ketrampilan yang diperlukan untuk menunjukkan suatu perilaku tertentu, setiap langkah dalam prosesnya ditentukan	Menekankan pada pendekatan terbuka untuk mencapai suatu tujuan setiap tahap dalam prosesnya tidak ditentukan

B. Metode Penyusunan Kurikulum Pelatihan Kepemudaan Non Formal

Metode pada kurikulum pelatihan tenaga kepemudaan non formal akan dilaksanakan secara metode Pendidikan Orang Dewasa (POD) atau *andragogical method* yang secara filosofis mendudukan subyek didik (pemateri/narasumber) dengan pendidik (peserta) pada posisi yang setara, sehingga proses pertukaran pengetahuan tidak hanya berasal dari satu arah atau dari pendidik saja seperti yang berlaku pada metode konvensional. Subyek didik dipandang memiliki "pengetahuan" berdasarkan pengalaman pembelajarannya dan pengetahuan tersebut dapat juga dibagikan selama proses belajar mengajar. Dengan metode andragogi ini diharapkan peserta akan berperan secara aktif melalui komunikasi dua arah.

Oleh sebab itu dalam penyusunan kurikulum, Tim Penyusun harus menciptakan metode pembelajaran yang mampu memancing partisipasi subyek didik dan memberi ruang untuk subyek didik dalam mengemukakan ide atau pikirannya melalui metode kreatif pendidik. Secara operasional, maka kurikulum yang tepat tidak hanya tepat secara teknis tetapi juga memperhatikan aspek kultural, sosiologis bahkan dalam materi tertentu seperti materi kepemimpinan perlu memperhatikan aspek psikologis dari subyek didik. Aspek ini dapat ditangkap dalam laporan pengamatan kebutuhan atau *Need Assessment* yang dilaksanakan sebelum penyusunan kurikulum ini dilaksanakan.

C. Sasaran

Pada pelatihan, sasarannya adalah para pemuda yang berusia antara 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun sesuai dengan definisi pemuda pada Pasal 1 UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Karenanya para perumus kurikulum pelatihan haruslah para akademisi dan praktisi yang memahami benar atas kebutuhan dan kepentingan para pemuda non formal.

#### D. Peserta Penyusun Kurikulum

Peserta kegiatan terdiri dari para akademisi dan praktisi yang sudah memiliki pengalaman sebagai penyusun kurikulum, memiliki pengalaman sebagai pelaku komunitas yang sudah bergerak dalam pemberdayaan masyarakat/pemuda, atau individu-individu tertentu yang dinilai cakap.

Kementerian Pemuda dan Olahraga akan melakukan seleksi pada penyusun kurikulum dimana peserta terpilih adalah individu yang telah memenuhi syarat. Keterwakilan perempuan dalam seleksi peserta akan menjadi syarat pelaksanaan penyusunan kurikulum pelatihan.

#### E. Kriteria Umum Penyusun Kurikulum

##### 1. Kompetensi Dasar

- a. telah memiliki pengalaman sebagai penyusun kurikulum terkait bidang kurikulum yang dikembangkan
- b. memiliki pengalaman sebagai pelaku di dalam kegiatan pemberdayaan komunitas atau kegiatan sosial bagi pembangunan pemuda
- c. cakap atau memiliki ketrampilan seperti yang diharapkan
- d. terbiasa menggunakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)

##### 2. Indikator Keberhasilan

- a. peserta mampu menyusun materi dalam kurikulum pelatihan secara komprehensif
- b. peserta mampu merumuskan pembelajaran secara sistematis dan terintegrasi
- c. peserta mampu mengembangkan kemampuan kognitif yang lebih tinggi melalui pengetahuan yang dibutuhkan pemuda non formal
- d. peserta mampu mengembangkan budaya pembelajaran yang aktif dengan berpartisipasi aktif bagi pemuda non formal
- e. peserta mampu mengikuti secara disiplin dan bertanggung jawab

Untuk penentuan kriteria khusus penyusun kurikulum di masing-masing bidang akan ditambahkan pada kurikulum tiap bidang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya.

#### F. Proses Perumusan Kurikulum

Pedoman Umum Penyusunan Kurikulum Pelatihan ini disusun berdasar 10 (sepuluh) bidang yang menjadi prioritas Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kesepuluh bidang ini ditetapkan menjadi prioritas dengan pertimbangan:

- 1) Bidang satu sampai empat terkait dengan pengembangan kapasitas diri dan daya saing pemuda non formal dalam menghadapi tantangan dan peluang masa depan.
- 2) Bidang kelima sampai kesepuluh terkait dengan tanggungjawab pemuda dalam merespon isu-isu krusial dan mendesak yang sedang dan akan dihadapi bangsa dan negara Indonesia

Kementerian Pemuda dan Olahraga menyadari sepenuhnya bahwa K/L teknis juga melakukan pelatihan yang mungkin lebih rinci terkait kesepuluh bidang tersebut. Karenanya dalam pengembangannya, Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan beberapa tahapan agar Pedoman Umum ini dapat mengakomodir dan bersinergi dengan K/L terkait. Tahapan mulai dari riset dokumen/literatur, diskusi dan workshop dengan K/L terkait tema kesepuluh bidang tersebut harus dilakukan.

Dalam pengembangan 10 (sepuluh) bidang kurikulum, Penyusun setidaknya mengembangkan setiap kurikulum berdasar pada 4 (empat) komponen. Setiap komponen saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Adapun keempat komponen kurikulum adalah:

- 1) Komponen tujuan yaitu komponen yang menjabarkan tujuan umum dan tujuan khusus dari pelatihan
- 2) Komponen isi yaitu komponen yang menjabarkan materi ajar dalam mencapai tujuan kurikulum. Komponen terkait bahan ajar yang antara lain terdiri dari silabus.
- 3) Komponen strategi yaitu komponen yang menjelaskan pendekatan dan metode serta peralatan yang digunakan dalam proses pelatihan. Komponen ini meliputi rencana metode dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan pelatihan.
- 4) Komponen evaluasi yaitu komponen yang menjelaskan metode dan tahap evaluasi dari setiap pelatihan sehingga dapat merefleksikan keberhasilan dari tujuan pelatihan.

Sedangkan detail dari bahan ajar (materi) setiap kurikulum, Penyusun wajib menjabarkannya ke dalam 3 (tiga) kategori materi yaitu:

- 1) Materi umum/dasar adalah materi yang bertujuan memberikan pemahaman tentang pengetahuan, konsep atau ketrampilan secara umum. Biasanya materi ini disajikan sebagai materi pengantar dalam suatu pelatihan.
- 2) Materi inti adalah materi yang terkait dengan pengetahuan, wawasan atau ketrampilan yang berkaitan langsung dengan kompetensi yang diharapkan.
- 3) Materi penunjang adalah materi yang terkait dengan pengetahuan, wawasan atau ketrampilan tambahan yang melengkapi kompetensi.

#### G. Kurikulum Pelatihan (10 Bidang)

(terurai dalam Tabel 2 sampai Tabel 11 berikut)

I. KURIKULUM BIDANG KEWIRAUSAHAAN

Tujuan kurikulum yang disusun pada bidang ini adalah pembentukan karakter wirausaha dari pemuda, menambah pengetahuannya mengenai seluk-beluk bisnis baik dari sisi *soft skill* maupun *hard skill* sehingga mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sekitarnya dalam menciptakan usaha sendiri setelah pelatihan.

Kriteria khusus:

- a. memiliki minat terhadap bidang kewirausahaan;
- b. sedang atau akan mengembangkan usaha kewirausahaan di lingkungannya;
- c. sedang atau akan memfasilitasi pengembangan usaha komunitas di lingkungannya;
- d. terbiasa menggunakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).

Tabel 2. Materi Pelatihan Bidang Kewirausahaan

No.	Materi	Jumlah JP (1 JP=45 Menit)
1.	Pengantar Pelatihan	1
2.	Pengantar Wawasan Kebangsaan	2
3.	Pengenalan Kewirausahaan	2
4.	Prinsip dan Etika Dasar Kewirausahaan	2
5.	Perencanaan Bisnis dan Organisasi Kewirausahaan	3
6.	Faktor Keberhasilan Wirausaha	2
7.	Strategi Membangun Network	2
8.	Pengenalan dan Strategi Branding	2
9.	Pemasaran (konvensional dan elektronik)	2
10.	Kunjungan Lapangan	7
Total JP		25

## II. KURIKULUM BIDANG KEPEMIMPINAN

Tujuan kurikulum yang disusun pada bidang ini adalah meningkatnya kemampuan pemuda memahami peluang dan tantangan pengembangan kepemimpinan pribadi, mengetahui potensi kepemimpinannya, mampu mengembangkan potensi kepemimpinannya dengan maksimal dan mampu dan berani mengambil inisiatif, menggerakkan perubahan, menjadi teladan dan memimpin kelompok, menyelesaikan pekerjaan dan memimpin untuk sukses.

Kriteria khusus:

- a. merupakan kader pemimpin dari organisasi kepemudaan atau organisasi lainnya di lingkungannya;
- b. sedang memfasilitasi program pemberdayaan pembangunan di komunitas wilayahnya;
- c. berencana akan menduduki jabatan tertentu di sebuah organisasi;
- d. terbiasa menggunakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).

Tabel 3. Materi Pelatihan Bidang Kepemimpinan

No.	Materi	Jumlah JP (1 JP = 45 menit)
1.	Pengantar Pelatihan	1
2.	Pengantar Wawasan Kebangsaan	2
3.	Dasar-Dasar Kepemimpinan	3
4.	Prinsip dan Etika Dasar Kepemimpinan	3
5.	Komunikasi dalam Kepemimpinan	2
6.	Metode Pemecahan Masalah	3
7.	Teknik Negosiasi	4
8.	Kunjungan Lapangan	7
Total JP		25

III. KURIKULUM BIDANG KEMARITIMAN DAN PARIWISATA

Tujuan kurikulum yang disusun pada bidang ini adalah meningkatnya kemampuan pemuda memahami peluang pariwisata dalam bidang maritim, potensi dan sumberdaya kelautan yang luar biasa, mencari solusi dari masalah kebaharian pada perairan yang ada di sekitarnya sehingga pariwisata di daerahnya dapat meningkat.

Kriteria khusus:

- a. berasal dari wilayah maritim yang menjadi prioritas pemerintah untuk pengembangan program kemaritiman;
- b. berasal dari desa yang sudah/sedang/akan dikembangkan oleh Pemerintah atau komunitasnya sebagai Desa Wisata;
- c. memiliki minat kuat di bidang kemaritiman dan Pariwisata maritim;
- d. terbiasa menggunakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).

Tabel 4. Materi Pelatihan Bidang Kemaritiman dan Pariwisata

No.	Materi	Jumlah JP (1 JP=45 menit)
1.	Pengantar Pelatihan	1
2.	Pengantar Wawasan Kebangsaan	2
3.	Pengenalan Kemaritiman	2
4.	Tata Kelola Dasar Kemaritiman	2
5.	Pengenalan Dasar Kemaritiman dan Pariwisata	3
6.	Jenis-Jenis Kemaritiman dan Pariwisata	2
7.	Manajemen Pariwisata	4
8.	Pengenalan tentang Membangun Kawasan Desa Wisata	2
9.	Kunjungan Lapangan	7
	Total JP	25

## IV. KURIKULUM BIDANG INDUSTRI DAN KEMANDIRIAN EKONOMI

Tujuan kurikulum yang disusun pada bidang ini adalah penguatan kemandirian ekonomi bagi pemuda agar mampu meningkatkan kondisi sosial ekonomi ke arah yang lebih baik, serta mampu membangun potensi diri/kelompok dengan bekal ketrampilan dan pengetahuan usaha bidang industri

Kriteria Khusus:

- a. memiliki minat dan bakat terhadap industri dan kemandirian
- b. kader pembangunan di wilayahnya yang sedang melakukan fasilitasi proses pengembangan industri kemandirian;
- c. diutamakan kandidat yang memiliki pengalaman di bidang industri dan kemandirian ekonomi sedikitnya 1 (satu) tahun;
- d. terbiasa menggunakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).

Tabel 5. Materi Pelatihan Bidang Industri dan Kemandirian Ekonomi

No.	Materi	Jumlah JP (1 JP=45 menit)
1.	Pengantar Pelatihan	1
2.	Pengantar Wawasan Kebangsaan	2
3.	Pengenalan Industri dan Kemandirian Ekonomi	3
4.	Pengenalan Ekonomi Kerakyatan	4
5.	Pemanfaatan Teknologi untuk Industri Kerakyatan	4
6.	Manajemen Industri Kerakyatan dan Kemandirian	4
7.	Kunjungan Lapangan	7
Total JP		25

## V. KURIKULUM BIDANG KEDAULATAN PANGAN

Tujuan kurikulum yang disusun pada bidang ini adalah meningkatnya pengetahuan pemuda atas konsep kedaulatan pangan dan konsep lain yang memiliki pertalian yang erat atas terwujudnya kedaulatan pangan dengan membahas keperluan mendesak kedaulatan pangan di tengah arus globalisasi, mendiskusikan kedaulatan pangan sebagai konsep kebijakan alternatif pertanian dan pangan serta menjelaskan secara rinci implementasi program kedaulatan pangan yang dilaksanakan pemerintah.

## Kriteria khusus:

- a. harus memiliki minat terhadap bidang agrarian dan kedaulatan pangan;
- b. berasal dari daerah agraris yang basis produksinya bertumpu pada sektor pertanian atau dari daerah yang sedang mengembangkan budi daya produk pertanian tertentu;
- c. sedang atau akan memfasilitasi komunitas di wilayahnya untuk mengembangkan program kedaulatan pangan berbasis komunitas;
- d. terbiasa menggunakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).

Tabel 6. Materi Pelatihan Bidang Kedaulatan Pangan

No.	Materi	Jumlah JP (1 JP=45 menit)
1.	Pengantar Pelatihan	1
2.	Pengantar Wawasan Kebangsaan	2
3.	Pengenalan Kedaulatan Pangan	3
4.	Kebijakan Kedaulatan Pangan di dalam Pertanian, Produksi dan Distribusi	3
5.	Tantangan dan Peluang Mewujudkan Kedaulatan Pangan	4
6.	<i>Green Technology</i> di Sektor Pertanian dan Pangan	3
7.	Cara Mengakses Informasi terkait Pengembangan Teknologi Pangan	2
8.	Kunjungan Lapangan	7
Total JP		25

## VI. KURIKULUM BIDANG KEDAULATAN ENERGI

Tujuan kurikulum yang disusun pada bidang ini agar pemuda memahami konsep dan praktek kedaulatan energi sehingga pemuda memiliki rasa akan pentingnya ketahanan dan kedaulatan energi nasional untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Kriteria khusus peserta:

- a. memiliki minat dan bakat pengembangan di bidang energi khususnya energi terbarukan;
- b. menempuh pendidikan dasar yang berkaitan dengan pengembangan energi;
- c. diutamakan kandidat yang memiliki pengalaman setidaknya 1 (satu) tahun di bidang pengembangan energi alternatif terbarukan;
- d. terbiasa menggunakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).

Tabel 7. Materi Pelatihan Bidang Kedaulatan Energi

No.	Materi	Jumlah JP (1 JP=45 menit)
1.	Pengantar Pelatihan	1
2.	Pengantar Wawasan Kebangsaan	2
3.	Pengenalan Kedaulatan Energi	4
4.	Peran dan Fungsi Negara dalam Menjaga Kedaulatan Energi Nasional	4
5.	Paradigma Baru Pengelolaan Energi	3
6.	Sharing Pengalaman, Cerita Sukses	4
7.	Kunjungan Lapangan	7
Total JP		25

## VII. KURIKULUM BIDANG TANGGAP BENCANA

Tujuan kurikulum yang disusun pada bidang ini adalah agar pemuda paham adanya beragam bencana yang terjadi di Indonesia, mempunyai kemampuan beradaptasi dan survive terhadap lingkungan pasca bencana terjadi, mampu menguasai dan mengimplementasikan dasar-dasar ataupun langkah utama dalam melakukan *need assessment* terhadap para korban dan memiliki keahlian dalam membuka ruas jalan sebagai akses masuknya bala bantuan (relawan).

Kriteria khusus peserta:

- a. memiliki minat dan bakat terhadap bidang tanggap bencana;
- b. kader pemuda di daerah rawan bencana;
- c. sedang memfasilitasi pengembangan program tanggap bencana di wilayahnya atau di organisasi kemasyarakatan;
- d. ingin bekerja di organisasi yang bergerak di bidang penanggulangan bencana di daerah;
- e. terbiasa menggunakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).

Tabel 8. Materi Pelatihan Bidang Tanggap Bencana

No.	Materi	Jumlah JP (1 JP=45 menit)
1.	Pengantar Pelatihan	1
2.	Wawasan Kebangsaan	2
3.	Pengenalan tentang Tanggap Bencana	4
4.	Penyusunan Prosedur Tanggap Bencana (SOP)	4
5.	Audit/Analisa Manajemen Bencana	4
6.	Sharing Pengalaman dan Cerita Sukses	3
7.	Praktek Tanggap Bencana	7
Total JP		25

## VIII. KURIKULUM BIDANG RAWAN SOSIAL

Tujuan kurikulum yang disusun pada bidang ini adalah agar pemuda paham dan mampu mengidentifikasi dan menawarkan alternatif penyelesaian rawan sosial di masyarakat (relawan).

Kriteria khusus peserta:

- a. memiliki minat dan bakat untuk pengembangan program penanggulangan kemiskinan di daerah rawan sosial;
- b. sedang berperan sebagai kader pembangunan di daerah rawan sosial;
- c. akan bekerja di lembaga yang bergerak di daerah rawan sosial;
- d. terbiasa menggunakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).

Tabel 9. Materi Pelatihan Bidang Rawan Sosial

No.	Materi	Jumlah JP (1 JP = 45 menit)
1.	Pengantar Pelatihan	1
2.	Pengantar Wawasan Kebangsaan	2
3.	Pengenalan Rawan Sosial	3
4.	Pencegahan Timbulnya Rawan Sosial	2
5.	Strategi Penanggulangan Rawan Sosial	4
6.	Peran Pemuda dalam Mencegah dan Menyelesaikan Rawan Sosial	2
7.	Sharing Pengalaman dan Cerita Sukses	4
8.	Kunjungan Lapangan	7
Total JP		25

## IX. KURIKULUM BIDANG PEMBERDAYAAN DAERAH TERLUAR

Tujuan kurikulum yang disusun pada bidang ini adalah agar pemuda mampu menjadi motivator, dinamisator dan penyelenggara kesejahteraan sosial di daerah terluar.

Kriteria khusus peserta:

- a. memiliki minat dan bakat terhadap pembangunan di daerah terluar;
- b. berasal dari daerah terluar Indonesia;
- c. sedang menjadi kader pembangunan di daerah terluar Indonesia;
- d. sedang atau akan bekerja di lembaga yang bergerak di bidang daerah terluar Indonesia;
- e. terbiasa menggunakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).

Tabel 10. Materi Pelatihan Bidang Pemberdayaan Daerah Terluar

No.	Materi	Jumlah JP (1 JP=45 menit)
1.	Pengantar Pelatihan	1
2.	Pengantar Wawasan Kebangsaan	2
3.	Pengenalan Pemberdayaan Daerah Terluar	3
4.	Paradigma Daerah Terluar	3
5.	Bedah Masalah, Tantangan dalam Memberdayakan Daerah Terluar	3
6.	Peran Pemuda dalam Pemberdayaan Daerah Terluar	3
7.	Sharing Pengalaman, Pembelajaran dan Cerita Sukses	3
8.	Kunjungan Lapangan	7
Total JP		25

## X. KURIKULUM BIDANG PENCEGAHAN NAPZA

Tujuan kurikulum yang disusun pada bidang ini adalah agar pemuda memiliki kesadaran yang penuh untuk tidak menggunakan Napza dan mampu menjadi pelopor, motivator dan “agen perubahan” bagi masyarakat di wilayahnya.

Kriteria khusus peserta:

- a. memiliki minat dan bakat di bidang kesehatan masyarakat;
- b. merupakan kader pembangunan di wilayahnya yang sedang memfasilitasi program kesehatan masyarakat;
- c. sedang menjadi tenaga honorer di Puskesmas atau rumah sakit daerah di wilayahnya;
- d. sedang bekerja di lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat;
- e. terbiasa menggunakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).

Tabel 11. Materi Pelatihan Bidang Pencegahan NAPZA

No.	Materi	Jumlah JP (1 JP=45 menit)
1.	Pengantar Pelatihan	1
2.	Pengantar Wawasan Kebangsaan	2
3.	Pengenalan Pencegahan Napza	2
4.	Bahaya Penggunaan Napza dan Hukum Penyalahgunaan Napza	3
5.	Pola/Modus Operandi Penyalahgunaan Napza	3
6.	Terapi dan Rehabilitasi bagi Penyalahguna dan Pecandu Napza	2
7.	Pemberdayaan Pemuda untuk Melindungi Masyarakat dari Napza	3
8.	Sharing Pengalaman, Pembelajaran dan Cerita Sukses	2
9.	Kunjungan Lapangan	7
Total JP		25

H. Prinsip-prinsip dalam penyusunan kurikulum pelatihan tenaga kepemudaan non formal

Prinsip dalam perumusan pedoman penyusunan kurikulum harus mengacu pada 6 (enam) prinsip pelatihan yang akan diterapkan dalam pelatihan, yaitu:

1. *Participation* (partisipasi) artinya penyusun pedoman kurikulum dan silabus harus menciptakan materi dan metode yang dapat mendorong peserta untuk ikut aktif dalam proses pelatihan dengan demikian peserta diharapkan akan lebih cepat menguasai materi yang diberikan.
2. *Repetition* (pengulangan) artinya penyusun kurikulum perlu memperhatikan adanya kebutuhan peserta akan proses pengulangan materi melalui diskusi dan permainan serta metode yang lain agar peserta lebih menguasai materi tersebut yang terefleksi dalam kurikulum dan silabus.
3. *Relevance* (relevansi) artinya penjelasan yang diberikan harus saling berhubungan. Peserta dapat diajak memberikan penjelasan umum terlebih dahulu baru kemudian akan belajar materi yang lebih khusus.
4. *Transference* (perpindahan atau penukaran) artinya penyusun kurikulum dan silabus harus yang mengakomodir kebutuhan peserta ke dalam program pelatihan.
5. *Feedback* (umpan balik) artinya penyusun kurikulum dan silabus dalam menyusun kurikulum dan silabusnya perlu mempertimbangkan adanya metode pelatihan yang akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan masukan tentang proses pelatihan dan diajak mengukur keberhasilan evaluasi secara bersama-sama.
6. *Paperless* artinya dalam pedoman penyusun kurikulum/silabus perlu mempertimbangkan penerapan prinsip ekologis ke dalam kurikulum/silabus dengan memberikan arahan penggunaan kertas selama pelatihan seminim mungkin menggunakan kertas. Di dalam pedoman penyusunan kurikulum perlu menyarankan salinan materi dapat dilakukan secara elektronik.

BAB III  
EVALUASI DAN MEKANISME PELAPORAN

A. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan dengan tujuan:

1. Untuk menilai efektivitas pelatihan
2. Mengukur keberhasilan pelatihan
3. Menarik pembelajaran dari faktor-faktor penyebab tidak efektifnya proses pelatihan

Evaluasi ini akan mencakup tahapan pelatihan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pelatihan. Setiap pihak yang terlibat dalam pelatihan akan menjadi subyek dalam evaluasi yang akan dilakukan. Untuk itu fokus evaluasi:

1. Evaluasi peserta
2. Evaluasi pelatih
3. Evaluasi kinerja penyelenggara

Metode evaluasi akan dilaksanakan secara partisipatif yang operasionalisasinya akan dilaksanakan sebagai berikut (Tabel 12.) :

Tabel 12. Metode Evaluasi Partisipatif

Tahap Pelatihan	Teknik Pelaksanaan	Output	Penilai
Sebelum pelatihan	lembar <i>pre-test</i>	Informasi tentang kapasitas (pengetahuan dan ketrampilan) peserta sebelum mendapat pelatihan	Trainer
Setelah Pelatihan			
- Kapasitas peserta	Lembar <i>post-test</i>	Informasi tentang kapasitas (pengetahuan dan ketrampilan) peserta setelah mengikuti pelatihan	Trainer

- Partisipasi peserta	Diskusi evaluatif	Informasi tentang tingkat partisipasi peserta	Peserta dan Trainer
- Kinerja Trainer	Diskusi evaluatif dan barometer mood	Masukan peserta terhadap kinerja atau <i>performance</i> trainer	Peserta
- Kinerja Penyelenggara	Diskusi evaluatif	Masukan dari peserta dan trainer terhadap kualitas penyelenggaraan (tempat pelatihan, akomodasi, menu makanan, training kit, dll)	Peserta dan Trainer

#### B. Mekanisme Pelaporan

Pelaporan akan dilaksanakan di setiap tahapan pelatihan yang meliputi:

1. Laporan awal (*initial report*): yang melaporkan persiapan pelatihan mencakup kesiapan sarana dan prasarana pelatihan, kesiapan materi dan bahan ajar pelatihan, kesiapan trainer, jumlah dan kapasitas peserta yang telah direkrut.
2. Laporan Akhir pelatihan: yang melaporkan seluruh proses pelaksanaan pelatihan dengan melampirkan hasil evaluasi yang dilaksanakan pasca pelatihan.

BAB IV  
PENUTUP

Pedoman Umum Penyusunan Kurikulum Pelatihan Tenaga Kepemudaan Non Formal merupakan bagian dari pembangunan kepemudaan. Dengan ditetapkannya Pedoman Umum Kurikulum ini maka diharapkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang dilaksanakan melalui pelayanan kepemudaan memiliki landasan yang kuat karena didukung oleh kurikulum dan pelatihan yang baku. Di sisi lain, pedoman ini diharapkan mampu menjadi panduan umum bagi pelatih dan narasumber dalam melatih tenaga kepemudaan non formal dengan 10 (sepuluh) bidang sehingga dalam menetapkan ruang lingkup dan metode pelatihan dapat dilakukan secara terencana, terfokus, terukur, standar dan dapat dijadikan rujukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun para pemangku kepentingan lainnya.

Akhir kata, kesuksesan penyusunan kurikulum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kedisiplinan, *leadership*, *team work* pelaksana dan spirit dan antusiasme. Untuk itu penulis berharap pelaksanaan dari pedoman kurikulum pelatihan ini akan diilhami oleh semangat untuk sukses bersama dalam memajukan pemuda Indonesia dan dilaksanakan secara partisipatif dan konstruktif.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

IMAM NAHRAWI